

KAPITALISME, MILITER DAN HUTAN

Penelusuran Atas Kejahatan Kekayaan Alam di Indonesia Era Orde Baru

Oleh : Drs. Sutrisno, M.Si

Artikel ini melacak kiprah militer dalam penjarahan hutan di Indonesia. Kapitalisme menjadi term of address proses institusionalisasi elemen-elemen "Pembangunan" awal Orde Baru. Bersamaan proses ini adalah legitimasi kekuasaan atas perilaku ekonomi, sosial-politik. Yang menjadi perhatian, proses tersebut di dalamnya mengandung peng-organisasian sosial – politik yang cenderung bersifat destruktif terhadap alam. Imperative Coordination Asotiation, meminjam term Ralf Dahrendorf, dalam tulisan ini dipakai untuk menjelaskan dominasi militer terhadap arah organisasi ekonomi, sosial – politik, belakangan justru "menjebakanya" dalam posisi konflik internal yang tak terhindarkan.

Kata Kunci : Kapitalisme, Model Pembangunan, Fungsionalisme Struktural, Fungsionalisme Konflik, Hegemoni, Dominasi, Ideologi, Konflik Internal.

Robert Heilbroner membuat ini¹. Buku ini memberikan heboh masyarakat dunia pada preskripsi masa depan umat tahun 80-an, dipicu dari buku yang manusia secara pesimistik diterbitkan di New York tahun 1980, *An Inquiry into the Human Prospect*. Menurutnya ada dua ancaman besar yang dihadapi spesies LSM Lingkungan Hidup dan manusia dalam kelangsungan hidupnya. Pertama, masalah mahasiswa zoology dan biologi ekologi dan demografi sebagai merasa belum "memadai" komitmen akibat pertumbuhan teknologi dan pengetahuannya kalau dibarengi distribusi sumber daya tidak menyebut nama Heilbroner dunia yang sangat buruk. Kedua,

¹ Banyak cerita dikalangan LSM Lingkungan Hidup bahwa gerakan sosial baru (new social movement) bernuansa lingkungan, semacam Green Peace, mendapatkan energi gerak dari buku Heilbroner ini.

potensi timbulnya perang yang membinasakan, yang dipicu oleh persaingan antar negara akibat dari (permainan) kapitalisme modern.

Pada poin kedua inilah, khususnya kapitalisme dipandang menjadi *term of address* terhadap terjadinya revolusi degradasi atas alam sepanjang sejarah umat manusia. Kebanyakan wilayah Asia- Afrika – mengikuti jalan fikir Karl Marx — mengenal kapitalisme yang sesungguhnya setelah bersentuhan dengan peradaban Barat melalui kolonialisme. Kapitalisme terus bertahan dan bergeser mengikuti perubahan alat produksi dalam masyarakat. Pada kapitalisme menjelang dewasa hingga dewasa, misalnya, penguasaan alat produksi oleh kelas atas melibatkan instrumen – instrumen hegemoni, semacam para intelektual, kaum agamawan, budayawan dan seterusnya. Namun, perjalanan masyarakat tidak berjalan linier, pada kurun tertentu alat produksi ini dipertahankan melalui kekuatan fisik lagi setelah pada awalnya diperoleh melalui kekuatan hegemoni. Di bawah ini adalah upaya kelas atas

mempertahankan alat produksi melalui kekuatan hegemoni.

Perselingkuhan Intelektual – Kekuasaan

Pada bagian ini melacak pertarungan “ideologi” pembangunan. Judul “Perselingkuhan Intelektual – Penguasa” tidak dibaca sebagai konspirasi politis, tetapi meminjam konsep Dahrendorf, adalah *imperative association coordination*. Persekutuan intelektual (kampus) dengan kekuasaan yang merupakan keniscayaan (koordinasi imperativ) dalam menopang proyek besar bernama “Pembangunan”. Tentu saja konsep pembangunan dengan P besar dan menggunakan tanda kutip, bermakna sebagai konsep yang mempunyai versi atau perspektif.

Satu tahun setelah buku Heilbroner yang menghebohkan itu, keluar buku yang ditulis seorang ekonom, Julian Simon, *The Ultimate Resource* diterbitkan Princenton University Press. Buku Simon mengkritik pandangan Heilbroner, khususnya pada sisi sumber daya².

² Ringkasan adu argument antara dua kubu ini periksa, misalnya dalam, Stephen K. Sanderson. 2000. *Makro Sosiologi; Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Rajawali Perss, hlm.595 – 604.

Menurut Simon melalui terobosan – terobosan teknologi sumber daya akan selalu dapat ditemukan yang baru. Jadi sumber daya tidak akan habis. Hal lain, Heilbroner salah dalam metodologi, menurut Simon. Pasalnya, Heilbroner hanya memposisikan ramalannya pada asumsi persediaan sumber daya alam yang diketahui (*known reserves*). Padahal sumber daya-sumber daya yang tak diketahui (*un-known reserves*) dan baru dapat sedikit demi sedikit dikuak ilmu dan teknologi berjumlah hampir tak terbatas. Dari kalangan kubu pembela Heilbroner balik mengkritik bahwa argumen Simon berpijak pada spekulasi yang tinggi; manusia tak bisa hidup sepenuhnya seperti yang digambarkan kisah – kisah sains fiksi, variabel kapitalisme yang menempatkan manusia untuk saling menelan juga tak terlalu diperhatikan dalam argumen Simon.

Di Indonesia, meskipun masih di kalangan.....sangat terbatas buku Robert Heilbroner lebih menjadi pegangan orang-orang LSM. Sementara Julian Simon

seakan akan akrab di lingkungan aktor negara. Paling tidak, debat dua komunitas ini (LSM, intelektual dan akademisi versus Negara) disadari atau tidak menampilkan argumen yang bermuara pada dua pemikiran Heilbroner – Simon. Dalam perkembangan selanjutnya debat dan argumentasi ini memasukkan kondisi-kondisi lokal Indonesia kaitannya dengan proyek besar pembangunan dalam pengertian yang luas. Tempat dimana buku itu terbitpun mengesankan dua “ideology” yang berbeda, New York (universitas New York) tempat mangkalnya Heilbroner memegang teguh idealisme, barangkali karena ada beberapa pelarian dari mazhab kritis Jerman di universitas ini. Princenton bersifat pragmatik-kapitalistik. Teori modernisasi yang disebar ke negara – negara berkembang berasal dari Princenton³ dimana Simon besar dan bermukim. Model pembangunan, organisasi institusional, bagaimana menempatkan hubungan agama dan negara⁴, sistem politik,

³ Perhatikan misalnya Suwarsono dan Alvin Y. So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

⁴ Meskipun Indonesia dalam ideologi Pancasila nampaknya cukup memberi kepastian soal hubungan agama dengan negara, namun sesungguhnya dalam proses social – politik hubungan agama dengan negara masih terbuka perdebatan. Era reformasi gejala perdebatan soal ini tampak bebas mengemuka, salah satunya perdebatan Perda Syariah, dan jelas masih ada persoalan yang belum selesai dalam hal ini.

konstruksi budaya, hingga menelusup jauh memasuki selera konsumsi masyarakat pada awal era Orde Baru yang selanjutnya bermuara pada "ideology" pragmatik-kapitalistik ini.

Kecenderungan pilihan model pembangunan pada era awal Orde Baru bisa saja dilacak dari tarik-menarik negara berkembang dalam konstelasi politik internasional pada masa perang dingin antara Amerika versus Uni Sovyet. Penjelasan semacam ini dilakukan Suwarsono dan Alvin Y. SO⁵. Amerika sangat berkepentingan memberikan fasilitas bagi ilmuwan sosialnya mempelajari permasalahan Dunia Ketiga, kemudian membantu pembangunan ekonomi dan kestabilan politik Dunia Ketiga agar tidak masuk perangkap ideologi pesaingnya, komunisme Uni Sovyet adalah strategi Pax Americana. "Banyak tentara-tentara AD yang dikirim ke AS untuk belajar sekaligus menjadi

bagian dari konspirasi negara kapitalis"⁶. Atau, menggodok ilmuwan social asal negara berkembang melalui beasiswa di universitas-universitas tertentu di Amerika. Cara kedua ini nampaknya lebih efektif dalam menyebarkan "ideology pembangunan" gaya kapitalisme liberal.

Memang tidak semua ilmuwan sosial penerima beasiswa Amerika berperan sebagai komprador ideologi kapitalisme dan melancarkan serangan terhadap *rival* (komunisme) sosialisme. Contoh paling menonjol adalah Arief Budiman, Doktor Sosiologi dari universitas Harvard. Dari sisi pertarungan ideologi pada perang dingin tahun 80-an Arief Budiman justru sesungguhnya "kontra-produktif" bagi wacana kapitalistik yang di-set sebagai kepentingan Amerika. Tapi tidak bagi (wacana) demokrasi. Karakter intelektual semacam Arief ini barangkali karena (justru) di

⁵ Ibid. hal. 7-8. Suwarsono dan Alvin Y. So menyebut paling tidak tiga hal yang melatarbelakangi metode pembangunan gaya Amerika yang akan disebar ke dunia berkembang – dalam hal ini munculnya teori modernisasi. Pertama, akibat Perang Dunia II munculnya Amerika sebagai kekuatan dominant dunia. Lebih kentara tahun 1950-an, praktis Amerika mengambil peran sebagai pengendali percaturan dunia. Kedua, pada saat bersamaan terjadi perluasan gerakan komunis sedunia. Ketiga, lahirnya Negara-negara baru di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang sebelumnya menjadi jajahan Eropa.

⁶ Indro Tjahjono, Peran Militer dalam Sistem Politik di Indonesia Sampai Jatuhnya Rezim Suharto, dalam Jurnal Wacana, Edisi 17, Tahun III 2004, hal. 54.

Harvard ia mengambil studi teori Marxis, topik yang dilarang di era Suharto. Bandingkan postur intelektual Arief ini, misalnya, dengan Harsya Bachtiar yang mendalami perspektif fungsionalisme structural Talcot Parson. Sepulangnya dari Amerika, Harsya membawa oleh-oleh khusus bagi mahasiswa sosiologi di Tanah Air, yaitu teori Sistem Sosial. Bukan sekedar teori yang diperkenalkan lewat wacana melalui seminar, kuliah dan media massa, lebih dari itu semua adalah memasukkannya teori ini dalam mata kuliah pada struktur kurikulum. Jadi, struktur masyarakat Indonesia dilihat secara mata kuda dari pendekatan structural fungsional (sistem). Tidak ada ruang buat teori konflik Marxian, dan Arief Budiman menemui kendala struktural menempatkan oleh-olehnya pada sebuah struktur kurikulum. Kurikulum universitas bagaimanapun mengandung dimensi artikulasi rezim kekuasaan politik.

Dari universitaslah *software* pembangunan ini berasal. Alumninya akan mengisi posisi-posisi birokrasi maupun aktor-aktor pengambil kebijakan.

Kondisi awal *academic spare* dimana realitas dibangun dan kebenaran didefinisikan yang menempatkan perspektif Struktural Fungsional sebagai anak emas⁷ sangat penting dalam merumuskan legitimasi atas tindakan kolektif ke-Indonesiaan Orde Baru. Yaitu penyelamatan regularitas kinerja kapitalisme pada tingkat lokal maupun global. Regularitas kinerja ekonomi ("Pembangunan") menjadi benda sakral. Tak ada yang mengalahkan kesakralannya, Pancasila sekalipun⁸. Untuk menjawab regularitas mekanisme pembangunan tanpa harus merusak sistem dan struktur kapitalisme pada level lokal dan global, maka masalah pembangunan dijelaskan dengan terori budaya. "Mengapa sebuah komunitas miskin, sementara yang lain

⁷. Dan tentu saja Perspektif Struktural Konflik sebagai anak haram, atau anak tiri yang boleh saja ada sekedar meramaikan diskusi akademik yang kering.

⁸. Banyak riset mengenai Negara Orde Baru tentang ekonomi politik menarik kesimpulan bahwa Pancasila diletakkan dibawah "Pembangunan", utamanya para pengguna teori Marxian. Literatur semacam ini beredar bebas pada era Orde Baru tanpa mempunyai implikasi terhadap kekuasaan secara signifikan, barangkali sifatnya yang sangat elitis. Di toko-toko buku loak di Jakarta dan Yogyakarta tidak sulit menemukan buku Richard Robison, misalnya, meskipun nama ini pernah dicekal.

kaya?"; jawabannya adalah mentalitas budaya! Jawaban semacam ini tidak berbahaya bagi sistem kekuasaan maupun sistem politik. Gejala-gejala sosial yang berupa konflik sipil– negara atau kerusuhan bersifat etnis dan agama sekalipun dilihat sebagai persoalan yang terpisah dari realitas ekonomi–politik. Konflik dan kerusuhan tadi dilihat sebagai *deviant from the order*, bukan sebagai artikulasi struktur politik – ekonomi yang *deviant*. Maka dalam kerangka perspektif inilah militer (tentara) menempatkan legitimasi struktural melakukan kiprahnya diluar barak.

Tentara dan Kekayaan Alam

Di atas telah diurai *academic spare* yang menjadi pintu masuk legitimasi tentara bermain diluar barak layaknya negara demokrasi. Lain dengan penjelasan legal formal atas legitimasi kiprah tentara di luar barak; menyebut teks undang-undang, selesai sudah.

Dalam penjelasan sosiologis, undang-undang diletakkan sebagai supra-struktur dari cermin moda produksi dan sistem produksi masyarakat.

Namun demikian, jika merujuk Barat (Eropa dan Amerika) sebagai kisah sukses kapitalisme, secara sosiologis Indonesia merupakan proyek kapitalisme yang “gagal”. Karena struktur sosial politik masyarakat Indonesia tidak muncul kelas menengah bersamaan dengan perayaan kapitalisme⁹, dan tidak beringsut kearah negara borjuasi demokrasi liberal. Sebagai substitusinya adalah menjadi negara birokrasi militer¹⁰. Meskipun ada beberapa orang kaya baru pada era Orde Baru, sejumlah pendapat peneliti yang dihimpun dalam buku Richard Tanter dan Kenneth Young ini ragu menempatkan orang-orang kaya baru di Indonesia itu sebagai kelas menengah. Karena mereka lahir dan besar dari per-selingkuhannya dengan militer. Mereka ini diantaranya, Lim Soe Liong, Bob Hasan, Ibnu Sutowo,

⁹. Lihat misalnya Richard Tanter dan Keneth Young. 1993. *Politik Kelas Menengah Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

¹⁰. Lihat misalnya Richard Robison. (tanpa tahun dan penerbit). *Suatu Analisa Kelas Tentang Negara Birokrasi Militer Indonesia*, ikhtisar satu tema pokok dari buku R. Robison *Capitalism and The Military Bireaucratic State in Indonesia, 1965 – 1975* (Disertasi pada Sydney University. 1978)

kelompok Cendana, Tommy Winata.

Pendekatan sosilogi pengetahuan di atas mengurai struktur kesadaran masyarakat merupakan konstruksi kelas atas melalui definisi realitas yang dikembangkan di dunia kampus. Perkara ini sukses dilakukan kekuasaan Orde Baru, hingga legitimasi yang menelusup pada struktur kesadaran masyarakat. Praksisnya, militer mengontrol kehidupan sipil. "Dominasi Angkatan Darat atas kehidupan politik pada akhirnya dibenarkan, karena adanya janji-janji pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi"¹¹. Padahal, menengok sejarah pembentukan institusi tentara dikerjakan oleh Kelompok Prapatan yang *nota bene* sipil. Dalam perjalanannya terjadi perpecahan di dalam (konflik internal), tarik menarik antara pengaruh hegemoni sipil dalam faham demokrasi (liberal) dengan militer. Mantan tentara kolonial (Nasution dan Suharto) mendominasi warna lembaga ini selanjutnya, penggalan sejarah inilah yang terus berkesinambungan (*the perpetuating*

history) hingga terhenti pada 1989 era reformasi. Fenomena konflik sosial semacam suku, agama, mungkin juga kelas dalam struktur episteme masyarakat kita bukan saja layak untuk diselesaikan dengan mengirim militer, lebih jauh bagi militer adalah sebagai instrument memperkuat posisinya terhadap wilayah sipil¹².

Lisensi atas dominasi yang digenggam militer itu tidak berhenti kiprahnya pada wilayah politik, yang diantaranya dilakukan melalui Dwi Fungsi, tetapi kemudian merembet pada penguasaan sumber ekonomi. Bisnis yang dikelola militer pertama kali adalah pengelolaan perusahaan minyak yang direbut dari Belanda. Setelah proses nasionalisasi sejumlah perusahaan Belanda ini "selesai" kering tidak ada lagi yang bisa digarap maka hutan dan tambang menjadi alternatif yang menggiurkan sebagai ladang garapan. Namun dalam proses menggarap aset alam ini yang memerlukan kecanggihan kelembagaan, tidak sesederhana merebut Pertamina.

¹¹. Harold Couch. 1986. *Militer Dan Politik Di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, hal.309.

¹². Penelitian yang mengungkap kiprah militer di wilayah konflik, misalnya lihat Jamal Bake, M. Abas dan Risnusu. (tanpa tahun), *Netralitas yang Semu*, PSPK, Jakarta.

Pada awalnya argumen dana militer yang terbatas dari negara cukup dimengerti sebagai dasar militer untuk berbisnis, dalam perjalanan yang tidak begitu panjang urusan bisnis ini menjadi melembaga sebagai fungsi ketiga setelah fungsi pertahanan keamanan dan fungsi sosial yang dikenal Dwifungsi ABRI.

Konstruksi canggih untuk dapat menyentuh langsung asset alam diantaranya melalui sistematisasi bisnis militer dalam format dalam tiga kaki, sebuah "teori" yang dipakai George Yunus Aditjondro¹³. Kaki pertama, bisnis institusional ABRI, yaitu perusahaan di bawah naungan yayasan dan koperasi. Pada tingkat Korem ada Primkopad, tingkat Kodam ada Puskopad, pada tingkat Pusat ada Inkopad. Ini juga terjadi pada AU, AL dan Kepolisian. Kaki kedua, Bisnis non-institusional, yaitu bisnis yang dimiliki purnawirawan atau keluarga ABRI. Kaki ketiga, bisnis kelabu – istilah yang dipakai Aditjondro. Semacam criminal economy, mayoritas pada bisnis

proteksi dan pengerukan kekayaan hutan.

Meskipun pengerukan kekayaan alam dan hutan berada pada level kaki ketiga namun ketiga kaki itu mempunyai relasi mutualisme, jadi mempunyai implikasi dahsyat terhadap hutan. Relasi penghubung ketiga kaki itu adalah struktur teritorial ABRI. Di kalangan militer sudah menjadi tradisi memberikan oleh-oleh kepada atasannya satwa langka (cendrawasih, nuri, mambruk, kasauri, buaya dan lain-lain) setelah pulang dari daerah. Laporan WWF tahun 1984 sekitar 23.500 ekor burung langka terkurus di Papua selama tahun 1963 sampai 1984 dalam operasi OPM. Dan bukan lagi menjadi rahasia kalau perburuan satwa di Taman Nasional Wasur, misalnya, membeli peluru di Kodim Meraoke.

Masih dari data Aditjondro, pesawat Herkules menerbangkan para pemburu militer lengkap dengan jeep dan meluncur ke Taman Nasional Wasur. Berton-ton daging rusa di sepanjang kali Moro diterbangkan pesawat Merpati,

¹³. Lihat *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana*, Edisi 17, Tahun III 2004. Selanjutnya, mohon ijin dengan rasa hormat saya kepada George Aditjondro sejumlah besar data investigasi beliau saya pinjam untuk melengkapi tulisan ini.

empat kali seminggu menjelang Natal atau Lebaran.

Dalam *illegal logging* terdapat kecenderungan satuan militer berkolusi dengan penebang hutan. Pengamatan Aditjondro di Kabupaten Jayapura tahun 80-an, seorang militer memukul Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Ir. Komboy yang menegurnya ketika memergoki penebangan liar itu. Ada kisah, eksploitasi dan perdagangan gaharu yang dilakukan oleh seorang alumnus Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih sempat terhenti akibat advokasi gerakan lingkungan, namun kemudian upaya eksploitasi ini justru lebih sukses setelah berkolusi dengan Pemuda Pancamarga dan FKPPPI. Melalui dua jalur ini (Pemuda Pancamarga dan FKPPPI) penjahat hutan ini menjalin kedekatan dengan perwira-perwira Angkatan Darat. Dalam perjalanan berikutnya Cucu Suharto, Ari Haryo Wibowo bahkan ikut *nyemplung* ke Papua untuk memimpin kartel dengan para pengumpul gaharu. Harganya fantastis di pasaran Timur Tengah, hingga 500 dolar tiap pound gaharu. Pengumpulan dan pengangkutan gaharu dari pedalaman Timika menggunakan

helikopter yang dikawal sejumlah anggota Kopassus. Fenomena ini betapa menunjukkan kuatnya relasi tiga kaki bisnis militer di atas.

Dampak ekologis penjarahan gaharu ini lebih serius dibanding dengan efek *illegal logging* pada umumnya, yaitu terbuangnya biomasa secara percuma. Tidak semua pohon yang mengandung gaharu, tidak pula ada alat deteksi kandungan gaharu di dalam pohon, jadi untuk memperolehnya dilakukan tebang secara spekulatif.

Penutup

Menghubungkan “hari ini” dengan sejarah

Prediksi oleh Departemen Kehutanan bahwa kerugian dalam penjarahan hutan mencapai 30-40 trilyun rupiah pertahun, angka ini baru pada *illegal logging*, belum menghitung implikasi pada satwa dan kemungkinan punahnya jenis botani tertentu sebagai akibat dari penebangan masif. Walhi memperkirakan, setiap menit sekitar 7,2 ha hutan di Indonesia gundul. Yang lebih mengejutkan dengan angka-angka fantastis ini aparat penegak hukum, kepolisian dan pihak kehutanan, masih belum bisa mengidentifikasi aktor dibalik sistem kerja penjarahan hutan.

Laporan Majalah *Konstan* Vol.II/ Edisi XXVIII, 12-26 Agustus 2006 ada sekitar 38 orang yang diduga menjadi actor utama yang menggerakkan pembalakan hutan.

Laporannya *Konstan* sepanjang lebih dari sepuluh halaman itu masih remang-remang, apakah misalnya, Gusti Syaifuddin, pensiunan tentara dengan pangkat terakhir Mayorjen termasuk satu dari 38 orang actor? Atau, Syaifuddin yang pernah menjadi staf ahli A.M Hendoprihyono saat menjabat Menteri Transmigrasi hanyalah aktor di level kesesekian? Laporan Majalah Mingguan Berita *Tempo*, edisi 13 Agustus 2006 mengisyaratkan adanya persaingan pembalakan liar ini diantara sesama militer. Penuturan kuasa hukum Gusti Syaifuddin, Aldenta Siringoringo (dalam *Tempo* edisi ini),

“... kasus kliennya bermula dari munculnya seorang yang menyebut dirinya kerabat seorang perwira tinggi Mabes Polri pada 23 Februari. Orang itu mengaku dari subkontraktor dari kontraktor yang pernah bekerja sama dengan PT Unggul pada tahun 2000-2003. Orang tersebut mengirim tagihan Rp. 2,2 milyar pada Gusti ...”

Kisah semacam ini tidak jauh dari kisah yang pernah terjadi pada era Orde Baru. Suatu ketika di Timika helikopter yang dipakai Kopassus untuk menerbangkan gaharu ditembaki dari darat. Banyak spekulasi tentang siapa pelaku penembakan itu, kabar yang tersebar pelakunya dari kalangan OPM. Tetapi menurut sumber lokal penembakan itu adalah indikasi adanya persaingan antara satuan-satuan Kopasus dan Kostrad untuk menguasai perdagangan gaharu¹⁴.

Meskipun Laporan *Tempo* nampaknya mengesankan lebih banyak memosisikan “suara”-nya lewat kuasa hukumnya. Bukan lagi hal yang menarik, bak kisah pewayangan – entah siapa yang benar antara Gusti dengan seseorang yang menyebut dirinya kerabat seorang perwira tinggi Mabes Polri, tetapi pilihan tindakan dengan cara menyembunyikan diri agaknya menambah jelas kisah-kisah konflik internal di kalangan penjarah hutan. Jadi, teori lama, Tiga Kaki Bisnis Militer bisa jadi belum terlalu tidak relevan di era pemenggalan posisi polisi dari militer.

¹⁴ Lihat George Junus Aditjondro, *Dari Gaharu ke Bom Waktu HIV/AIDS yang Siap Meledak*, dalam *Jurnal Wacana* Edisi 17, Tahun III 2004, hal.98.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azka, Najib. 1998. *Higemoni Tentara*, LKiS, Yogyakarta.
- Crouch, Harold. 1986. *Militer Dan Politik Di Indonesia*, terj. Th. Sumartana, Sinar Harapan, Jakarta.
- Eatwell, Roger dan Anthony Wright (edt.). 2004. *Ideologi Politik Kontemporer*, terj. R.M. Ali, Jendela, Yogyakarta.
- Heilbroner, Hobert.L. 1980. *An Inquiry into The Human Prospect*, Norton, New York.
- Held, David. 2004. *Demokrasi dan Tantangan Global*, terj. Damanhuri, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Lloyd, Cristopher. 1987. *Teori Sosial dan Praktek Politik*, terj. Tim Aksara Persada Indonesia, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Robison, Richard. 1984. *Sejarah Politik Orde Baru*, terj. Aboeprijadi dkk., LSP, Jakarta.
- _____. (tanpa tahun). *Suatu Analisa Kelas Tentang Negara Birokrasi Militer Indonesia*, adalah Risalah ikhtisar Disertasi di Sydney University, "Capitalism And Military Birocratic State In Indonesia".
- Sanderson, K. Stephen. 2000. *Makro Sosiologi*, terj. Farid Wajidi dan S. Menno, Rajawali Pers, Jakarta.
- Setiawan, Bonie. 1999. *Peralihan Kapitalisme Di Dunia Ketiga*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Simon, Julian. 1981. *The Ultimate Resource*, Princeton University Perss, Princeton.
- Suwarsono dan Alvin Y.SO. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Tanter, Richard dan Kenneth Young. 1993. *Politik Kelas Menengah Indonesia*, terj. Nur Iman Subono, Arya Wisesa, Ade Armando, LP3ES, Jakarta.

Jurnal dan Majalah

- Jurnal Ilmu Sosial dan Transformatif Wacana, Edisi 17. Tahun III 2004.
- Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2002.
- Majalah Prospektif Mingguan Bisnis dan Investigasi, Edisi 03, Vol.8, 23 – 29 Januari 2006.
- Majalah Konstan, Vol.II/ Edisi XXVIII, 21—06 Agustus 2006.
- Majalah Tempo, Edisi 23, 31 Juli – 6 Agustus 2006.
- Majalah Tempo, Edisi 7-13 Agustus 2006.